BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sengketa harta warisan merupakan salah satu jenis kasus yang banyak ditemui dalam kehidupan masyarakat. Sengketa harta warisan terjadi, karena rendahnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya musyawarah dan mufakat dalam kehidupan bermasyarakat serta sebagian besar masyarakat tidak memahami pula aturan-aturan dalam hukum-hukum waris yang berlaku. Hal ini kemudian berdampak pada kasus-kasus harta warisan yang berkepanjangan yang harus diselesaikan melalui pengadilan.

Di Indonesia terdapat berbagai aturan dan tata cara pembagian harta warisan. Hal ini berakibat pula pada cara-cara pembagian harta warisan di Indonesia sangat beragam. Keberadaan hukum waris itu sendiri kemudian berdampak pada pembagian harta warisan dilalui dengan berbagai cara dalam kehidupan masyarakat sehingga masing-masing suku dan etnis memiliki pandangan tersendiri dalam penyelesaian pembagian harta warisan.

Keragaman penyelesaian pembagian harga warisan di Indonesia sampai saat ini masih dilakukan dengan cara yang berbeda-beda pada setiap lapisan masyarakat tersebut tetap berpegang pada sisten yang ada . Pluraliesme hukum waris ini terjadi karena di Indonesia terdapat tiga sistem yang dijadikan pegangan oleh masyarakat dalam melakukan pembagian harta warisan yaitu menurut Hukum Waris Adat, Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Perdata¹

¹ Sjarif, Surini Ahlan. 2009 Hukum Kewarisan Menurut Undang-Undang. Halaman 1

Hukum waris adat yang ada di Indonesia sangat beraneka ragam. Hukum waris adat tersebut dilakukan sesuai dengan adat dan tradisi pada masing-masing suku maupun etnis yang ada di Indonesia. Tata cara dan pelaksanaannya pun sangat berbeda karena masing-masing suku dan etnis memiliki pandangan dan pegangan hukum adat yang berbeda yang dilaksanakan secara turun temurun dari nenek moyang mereka.

Di samping hukum adat, dalam pembagian harta warisan dilakukan Hukum waris Islam di Indonesia. Hukum waris Islam dirumuskan sebagai perangkat ketentuan hukum yang mengatur pembagian harta kekayaan yang dimiliki seseorang pada waktu meninggal dunia yang sumber hukumnya adalah Al-Quran sebagai kitab suci, Hadist Nabi, Qias yang merupakan analogon dari penyelesaian kasus yang pernah terjadi dan ijma atau kesamaan pendapat²

Hukum waris lainnya yang digunakan di Indonesia adalah Hukum waris Perdata. Pembagian harta warisan menurut hukum waris perdata dapat dilaksanakan ketika terbukanya warisan, ditandai dengan meninggalnya pewaris dan biasanya pembagian tidak dapat dilakukan secara damai. Dalam hukum waris perdata untuk mewarisi harus adanya orang yang meninggal yang disebut dengan pewaris.

Pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan bahwa “pewarisan hanya berlangsung karena kematian, Peristiwa kematian menurut hukum mengakibatkan terbukanya warisan dan sebagai konsekwensinya seluruh kekayaan (baik berupa Aktiva maupun pasiva) yang tadinya dimiliki oleh seorang

² Iman Sudiyat. 2009. Peta Hukum Waris di Indonesia hlm 17

peninggal harta beralih dengan sendirinya kepada segenap ahli warisnya secara bersama-sama”.

Untuk waktu pelaksanaan pembagian warisan tidak adanya ketentuan tersendiri dari peraturan waris perdata yaitu yang termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Namun adanya ketentuan mengenai tidak dibenarkan harta warisan atau harta peninggalan dibiarkan dalam keadaan tidak terbagi yang mana dituangkan dalam Pasal 1066 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pembagian harta warisan atau harta peninggalan diawali dengan penentuan siapa saja yang berhak untuk mendapatkan bagian-bagian tersebut serta menentukan besarnya bagian-bagian harta warisan³ Pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dijelaskan bahwa “bagian yang didapat oleh yang berhak tersebut serta langkah selanjutnya penyelesaian pembagian harta warisan yang dilaksanakan dengan kesepakatan para pihak yang berhak dalam pembagian harta warisan tersebut. Pihak yang berhak dalam pembagian harta warisan atau harta peninggalan adalah ahli waris, ahli waris merupakan “orang-orang yang berhak menerima harta warisan (harta pusaka)”

Pihak yang berhak dalam pembagian harta warisan atau harta peninggalan adalah ahli waris, ahli waris merupakan “orang-orang yang berhak menerima harta warisan (harta pusaka) yang tergabi dalam waris perdata ada dua pembagian, yaitu ahli waris karena undang-undang (ab intestato) dan ahli waris karena wasiat (testamentair). Jika putusnya perkawinan karena perceraian maka hubungan harta dan hubungan perdata antara suami dan istri telah berakhir dan adanya pemisahan

³ Syahril Sofyan Dasar Teknik Pembuatan Akta Untuk Warisan hlm 5

tersendiri. Namun anak tidak dapat diperlakukan dengan demikian, sehingga sampai kapanpun adanyahak anak dalam pewarisan terhadap ibu dan atau ayahnya.

Begitu juga dengan keturunan dari anak-anak si pewaris, jika anak dari pewaris meninggal dunia terlebih dahulu, maka warisan turun kepada cucu atau keturunan sah dari si anak (masih hubungan darah), yang mana kalimat dari Pasal 852 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatakan mewarisi pancang demi pancang yang bermaksud sebatas hanya sebagai pengganti dalam pewarisan. Pada golongan pertama adanya hak suami atau istri dalam pewarisan untuk saat ini.

Pada kenyataannya, walaupun tata cara pembagian harta warisan telah memiliki sistem yang merupakan landasan dalam membagi harta warisan tetapi sengketa pembagian harta warisan tetap tidak dapat dihindari dalam kehidupan masyarakat. Hal ini disebabkan dari ketidak pahaman terhadap tata cara pembagian warisan maupun adanya perilaku yang ingin menguasai sendiri harta yang diwariskan. Penyebab sengketa pembagian harta warisan lainnya dapat dilihat dari perilaku masyarakat yang kurang mengutamakan musyawarah dan mufakat sehingga perdamaian dalam pembagian warisan sulit dilakukan walaupun dilakukan dengan menggunakan mediator yang paham tentang sistem pembagian warisan. Keadaan ini yang mengakibatkan pembagian harta warisan menjadi sengketa yang akhirnya ditempuh ke meja pengadilan.

Pengadilan Negeri Limboto Kabupaten Gorontalo tidak terlepas dari penanganan terhadap sengketa harta warisan. Terdapat beberapa pola dalam penyelesaian putusan sengketa harta warisan menurut hukum Perdata. Pola

penyelesaian putusan tersebut didasarkan pada KUH Perdata sesuai dengan jenis dan ragam kasus yang ditangani oleh pengadilan yang selanjutnya diupayakan untuk diadaili sehingga masyarakat yang memiliki sengketa akan mendapatkan keadilan sebagaimana yang diharapkan.

Pola penyelesaian sengketa harta warisan yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Limboto Kabupaten Gorontalo tersebut yang memberikan dorongan bagi peneliti untuk mencermati masalahnya dan selanjutnya melakukan penelitian dengan alasan memahami pola-pola penyelesaian putusan sengketa harta warisan sangat penting dalam memberikan kontribusi dalam mengembangkan pemahaman tentang hukum khususnya eksistensi hukum waris yang berlaku di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti melakukan penelitian dengan judul sebagai berikut: Pola Penyelesaian Putusan Nomor 17/PDT.G/2008/PN.Lbt, Nomor 26/PDT.G/2014/PN.Lbt dan Nomor 03/PDT.G/2014/PN.Lbt Sengketa Harta Warisan menurut Hukum Perdata BW di Pengadilan Negeri Limboto Kabupaten Gorontalo.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana sengketa harta warisan menurut Hukum Perdata Indonesia (BW) di Pengadilan Negeri Limboto Kabupaten Gorontalo.
2. Bagaimana penyelesaian sengketa harta warisan menurut Hukum Perdata Indonesia (BW) di Pengadilan Negeri Limboto Kabupaten Gorontalo.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sengketa harta warisan menurut Hukum Perdata Indonesia (BW) di Pengadilan Negeri Limboto Kabupaten Gorontalo.
2. Untuk mengetahui penyelesaian sengketa harta warisan menurut Hukum Perdata Indonesia (BW) di Pengadilan Negeri Limboto Kabupaten Gorontalo.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini bermanfaat secara teoretis dan bermanfaat praktis yang akan diuraikan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian bermanfaat dalam memahami landasan-landasan hukum waris tentang sengketa harta warisan menurut Hukum Perdata BW.

2. Manfaat Praktis

Melatih keterampilan berpikir untuk memecahkan permasalahan-permasalahan hukum waris khususnya penyelesaian putusan Nomor 17/PDT.G/2008/PN.Lbt, Nomor 26/PDT.G/2014/PN.Lbt dan Nomor 03/PDT.G/2014/PN.Lbt sengketa harta warisan menurut Hukum Perdata BW.